

Evaluasi Kebijakan Bantuan Dana Pendidikan: Studi Kasus Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya

Evaluation of Education Funding Policy: A Case Study of the Surabaya "Pemuda Tangguh" Scholarship Program

Tara Avrilyana Desvita¹⁾, Meilisa Mufarocho²⁾, Andhika Abhinaya Ivanda³⁾, Indah Prabawati⁴⁾, Firre An Suprpto⁵⁾

^{1,2,3,4,5)}Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Ilmu Administrasi Negara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 27 April 2026

Keywords

Evaluation, Scholarship, Surabaya

Kata Kunci:

Evaluasi, Beasiswa, Surabaya



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Education is the most crucial aspect in measuring the progress of a nation. The Government of Indonesia guarantees the right to education and finances basic education for its citizens as part of its responsibility to educate the nation. However, the compulsory education program has not been fully realized, as evidenced by the existence of children who have not yet received formal education. One of the efforts made by the Surabaya City Government to improve access to education for underprivileged students in Surabaya is by launching the Pemuda Tangguh Scholarship Program. This study aims to evaluate the Pemuda Tangguh Scholarship Program in Surabaya. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include observation and interviews with research subjects. The subjects consist of scholarship coordinators and student beneficiaries of the program. The study analyzes the program using policy evaluation theory proposed by William N. Dunn, which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that the scholarship program has succeeded in expanding access to higher education, particularly for students enrolled in private

universities in Surabaya. However, there are significant challenges related to the adequacy of financial assistance and responsiveness to public aspirations, especially concerning the reduction in the amount of aid, which has triggered complaints from beneficiaries.

ABSTRAK

Pendidikan menjadi aspek paling krusial dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia menjamin hak pendidikan dan membiayai pendidikan dasar warganya sebagai tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kegiatan wajib belajar belum sepenuhnya terwujud dibuktikan dengan masih adanya anak yang belum mengenyam pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Kota Surabaya yaitu dengan meluncurkan Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara bersama subjek penelitian. Subjek penelitian ini meliputi koordinator penerima beasiswa dan mahasiswa yang menerima beasiswa. Penelitian ini menganalisis Program Beasiswa Pemuda Tangguh melalui teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dengan enam indikator seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPTS telah berhasil memperluas cakupan akses pendidikan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya. Namun, terdapat tantangan signifikan pada aspek kecukupan bantuan dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama terkait kebijakan pemangkasan nominal bantuan yang memicu keluhan dari para penerima manfaat.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia di atur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pendidikan didefinisikan sebagai proses pendewasaan manusia melalui perubahan perilaku, kognitif, dan kepribadian untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani sesuai

nilai masyarakat (Habsy *at al.*, 2024). Pendidikan menjadi aspek paling krusial dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengkristalisasi nilai-nilai peserta didik yang terintegrasikan dalam pola kepribadian dan kehidupan yang ideal dan utuh di landasi keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Asfar *at al.*, 2020). Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat 1 dan 2 yang pemerintah menjamin hak pendidikan dan mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar warga negara Indonesia sebagai tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar belum sepenuhnya terwujud karena tidak semua warga di Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Banyak anak dari lapisan masyarakat ekonomi rendah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas hingga putus sekolah (Mursal *at al.*, 2024). Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak (Masykuri *at al.*, 2025). Menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) September 2025, proporsi masyarakat miskin di Indonesia mencapai 8,25% menurun 0,22% terhadap Maret 2025 dan menurun 0,32% terhadap September 2024. Angka tersebut masih cukup besar dan membutuhkan perhatian pemerintah untuk mengupayakan setiap anak dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sektor ini menjadi bagian dari sistem nasional yang berperan strategis dalam meningkatkan kualitas bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan, sekaligus mendorong pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Artinya, pemerintah berupaya memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh masyarakat, dengan kualitas yang baik serta sesuai kebutuhan. Hal ini memerlukan pengelolaan yang dirancang secara matang, terarah, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kondisi penduduk dan wilayah agar dapat mendukung kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat (Samhaji & Anggara, 2025).

Fenomena yang terjadi di Indonesia yakni sebagian anak yang berusia produktif tidak memperoleh hak pendidikan dikarenakan terbatasnya kemampuan orangtua untuk membayar dana pendidikan (Azizah & Achdiani, 2025). Salah satu upaya untuk memecahkan rantai kemiskinan yaitu pemberian beasiswa (Septiwati *et al.*, 2022). Dengan kata lain, beasiswa menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan pada gilirannya membantu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kemakmuran rakyat. Kota Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan warganya melalui program Beasiswa. Program Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya disebut dengan Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya diatur terutama melalui Perwali Nomor 45 Tahun 2025. Jenis program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya ada dua, yaitu:

1. Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya di tingkat SMA Sederajat yang menargetkan pelajar asli Kota Surabaya kelas 10, 11, dan 12 berupa bantuan yang SPP, biaya buku, dan uang saku bulanan.
2. Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya di tingkat Perguruan Tinggi yang menargetkan mahasiswa PTN/PTS asli warga Kota Surabaya berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), uang saku bulanan, dan bantuan penunjang pendidikan tiap semester.

Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, khususnya di tingkat Perguruan Tinggi dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. Disbudporapar mendelegasikan program ini ke Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Kota Surabaya untuk melaksanakan dan mendukung Program tersebut. 32 Perguruan Tinggi sebagai mitra Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, diantaranya ada ITS, UNAIR, UNESA, PENS, PPNS, UPN VETERAN JATIM, UM Surabaya, UBAYA, Universitas Ciputra, UNTAG, dan lain sebagainya. Berikut alur pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya di tingkat Perguruan Tinggi:

Persiapan Dokumen:

1. Scan KTP Surabaya & Kartu Keluarga (KK).
2. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau bukti diterima di PTN/PTS.
3. Scan Transkrip nilai dan KRS semester berjalan dengan IPK minimal 3.00 (untuk mahasiswa aktif).
4. Scan sertifikat prestasi (khusus jalur non-akademik).
5. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain (diunduh di aplikasi).
6. Diutamakan mahasiswa kategori desil 1-5.

Pendaftaran Online:

1. Akses laman <https://besmart.surabaya.go.id>.
2. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
3. Mengunggah semua dokumen persyaratan.

Seleksi Berkas:

1. Tim Pemkot Surabaya bersama Disbudporapar akan melakukan verifikasi berkas secara online (biasanya dilakukan beberapa minggu setelah penutupan pendaftaran).

Pengumuman & Registrasi Ulang:

1. Hasil seleksi akan diumumkan secara online.
2. Peserta yang lolos diwajibkan melakukan registrasi ulang.

Pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya sudah berjalan baik, namun adanya perubahan regulasi kebijakan menyebabkan adanya keluhan dari para penerima. Sebelumnya, Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya di tingkat Perguruan Tinggi hanya diperuntukkan untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri. Namun, sejak Februari 2026 Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya memperluas cakupan penerima untuk Perguruan Tinggi Swasta. Kebijakan ini sudah disahkan melalui penandatanganan MoU oleh Pemkot Surabaya beserta Disbudporapar dengan total kuota 24.000 penerima. Hal ini menyebabkan pengurangan dana bantuan yang diberikan pada penerima beasiswa. Mereka merasa sangat keberatan dengan nominal yang diterima dan merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk pembayaran UKT.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui evaluasi kebijakan, pemerintah

dapat mengetahui keberhasilan, manfaat, serta kekurangan dari suatu program sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap hasil dari suatu kebijakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan publik. Evaluasi tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap masyarakat.

William N. Dunn mengemukakan enam kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan. Kecukupan menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mengatasi permasalahan yang menjadi dasar munculnya kebijakan tersebut. Selanjutnya, pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan agar dapat dirasakan secara adil oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Responsivitas menunjukkan kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Sedangkan ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai pelaksanaan program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya pada tingkat perguruan tinggi. Melalui pendekatan ini, kami berupaya memperoleh gambaran yang lebih rinci terkait proses pelaksanaan program serta perubahan yang terjadi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer dan sekunder pada tanggal 1-30 maret 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan program, mekanisme penyaluran beasiswa, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi berbagai dokumen pendukung seperti peraturan kebijakan, data penerima beasiswa, serta informasi lain yang berkaitan dengan program tersebut.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program, yaitu penerima sekaligus koordinator program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Informasi yang diperoleh dari informan tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), yang meliputi beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program.

Analisis dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa penerima beasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani, 2017). Program Beasiswa Pemuda Tangguh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk kebijakan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan studi bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi. Program ini mengacu pada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan program. Pedoman tersebut mengatur tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, verifikasi data, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan. Seluruh tahapan tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling terhubung dalam rangka mencapai tujuan program.

Hal ini sejalan dengan pendapat Pratama (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, baik dalam bentuk peraturan maupun ketentuan teknis lainnya, yang di dalamnya memuat tujuan serta mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh dapat dikategorikan sebagai implementasi kebijakan yang bersifat top down, di mana kebijakan yang telah ditetapkan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dunn (2003), sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik antara tiga unsur utama, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dalam konteks Program Beasiswa Pemuda Tangguh, sistem kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan publik, berupa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengatur penyelenggaraan Program Beasiswa Pemuda Tangguh sebagai upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Pelaku kebijakan, yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, meliputi pemerintah daerah sebagai pengelola sekaligus pengambil keputusan serta mahasiswa sebagai penerima manfaat program.
3. Lingkungan kebijakan, yaitu kondisi sosial masyarakat serta mahasiswa penerima program yang secara tidak langsung berperan dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan melalui respon dan pengalaman yang dirasakan.

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Diana (2023) menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan secara sistematis, rinci, serta menggunakan prosedur yang telah teruji untuk mengukur sejauh mana tujuan program dapat tercapai. Program Beasiswa Pemuda Tangguh, dievaluasi dengan mengacu pada tujuan program yang telah ditetapkan, yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi agar dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Program Beasiswa Pemuda Tangguh mengalami beberapa dinamika kebijakan, salah satunya adalah perubahan skema bantuan yang berkaitan dengan pemangkasan anggaran. Perubahan tersebut berdampak pada besaran bantuan yang diterima oleh mahasiswa, yang semula dipersepsikan sebagai pembiayaan penuh, kemudian disesuaikan menjadi bantuan parsial dengan nominal tertentu. Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting dalam melihat pelaksanaan program secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan program juga mencakup proses seleksi penerima yang didasarkan pada kriteria tertentu, seperti kondisi ekonomi dan kelayakan administratif. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, baik dalam proses verifikasi data maupun dalam penyampaian informasi kepada calon penerima.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh faktor teknis di lapangan.

Pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh menunjukkan bahwa meskipun program telah memiliki dasar kebijakan yang jelas serta tujuan yang terarah, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai dinamika dan kendala, seperti perubahan skema bantuan akibat pemangkasan anggaran, keterlambatan penyaluran dana, keterbatasan sosialisasi, serta ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan realisasi di lapangan yang berpotensi mempengaruhi capaian program secara keseluruhan. Kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut melalui suatu evaluasi kebijakan yang sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penggunaan kriteria tersebut bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh secara lebih mendalam berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan.

Efektivitas

Kriteria efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks BPTS, efektivitas terlihat pada keberhasilan pemerintah dalam memperluas cakupan penerima manfaat. Sejak Februari 2026, kebijakan ini telah menjangkau mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan total kuota mencapai 24.000 penerima. Pada bulan maret 2026 terdapat penambahan jumlah penerima sebanyak 13.000. Hal ini disampaikan oleh koordinator Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya:

“Berdasarkan data yang kita peroleh terdapat penambahan kuota sebanyak 13.000 di bulan Maret ini” (Koordinator, 20 Februari 2026).

Penambahan jumlah penerima ini merupakan langkah progresif dalam mencerdaskan warga asli Surabaya secara massal. Namun, efektivitas program ini mengalami tantangan serius terkait perubahan skema bantuan dari pembiayaan penuh menjadi bantuan parsial. Meskipun kuota bertambah, kemampuan kebijakan dalam menjamin keberlangsungan studi mahasiswa secara tuntas menjadi berkurang karena nominal dana yang diterima menurun, yang kemudian memicu keluhan dari para penerima beasiswa.

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil maksimal. Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan efisiensi administratif melalui digitalisasi proses pendaftaran dan verifikasi melalui portal *Besmart*. Penggunaan sistem ini meminimalkan birokrasi fisik dan mempercepat alur pendaftaran mulai dari persiapan dokumen hingga pengumuman hasil seleksi. Akan tetapi, dari sisi efisiensi anggaran, terjadi dinamika di mana peningkatan jumlah penerima berdampak langsung pada pengurangan nilai bantuan per individu. Hal ini menunjukkan adanya *trade-off* kebijakan; pemerintah berusaha mengefisiensikan anggaran terbatas untuk mencakup lebih banyak mahasiswa, namun di sisi lain mengurangi nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh setiap individu.

Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan menilai sejauh mana tingkat bantuan yang diberikan mampu memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi sasaran kebijakan. Data menunjukkan bahwa pada September 2025, garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Indonesia mencapai rata-rata Rp 3.053.269,00 per bulan. Dengan kondisi ekonomi tersebut, kebijakan pengurangan nominal bantuan beasiswa dianggap tidak mencukupi untuk menutupi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)

dan biaya penunjang pendidikan lainnya. Para penerima yang mayoritas berasal dari kategori desil 1-5 merasa bahwa besaran bantuan saat ini tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan primer. Seperti yang disampaikan oleh Haikal selaku salah satu penerima program: “Pengurangan dana sangat berdampak bagi kami. Karena dana yang diberikan kurang sehingga bingung mencari tambahan akibatnya jadi pinjol atau cuti kuliah” (Haikal, 20 Februari 2026)

Ketidakcukupan mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai bantuan yang disediakan dengan biaya hidup serta pendidikan riil di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara optimal, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga belum sepenuhnya tercapai.

Pemerataan (*Equity*)

Kriteria pemerataan mengevaluasi distribusi manfaat kebijakan agar dapat dirasakan secara adil oleh kelompok sasaran. Dalam aspek ini, BPTS menunjukkan performa yang sangat baik melalui perluasan akses bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS. Sebelum Februari 2026, beasiswa ini cenderung eksklusif bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan melibatkan 32 perguruan tinggi mitra, termasuk institusi seperti UM Surabaya, UBAYA, hingga Universitas Ciputra, kebijakan ini telah menciptakan keadilan akses bagi seluruh warga asli Surabaya tanpa memandang status hukum kampus mereka. Distribusi ini memastikan bahwa hak pendidikan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh pemuda di berbagai lapisan masyarakat.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perluasan kuota penerima ke sektor PTS merupakan bukti bahwa pemerintah mendengarkan tuntutan publik akan pemerataan bantuan pendidikan. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya diikuti dengan manajemen ekspektasi yang baik terkait besaran dana. Keluhan yang muncul dari para penerima menunjukkan bahwa pemerintah kurang responsif terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari pemangkasan anggaran secara mendadak. Seperti yang disampaikan oleh Akmal selaku penerima program:

“Tidak ada sosialisasi terkait perubahan program sehingga kami tidak bisa langsung merespon baik. Ketika ingin meminta solusi juga tidak ada tanggapan” (Akmal, 20 Februari 2026)

Ketidakpuasan penerima manfaat mencerminkan adanya hambatan komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan, sehingga respons publik terhadap perubahan regulasi cenderung negatif karena dianggap mengurangi kesejahteraan ekonomi mahasiswa yang sudah bergantung pada beasiswa tersebut.

Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan menilai apakah tujuan kebijakan sudah sesuai dengan akar permasalahan publik yang ingin diselesaikan. Secara substansi, BPTS sangat tepat karena menyasar mahasiswa berprestasi dengan IPK minimal 3.00 dari keluarga kurang mampu. Penggunaan kriteria desil 1-5 sebagai prioritas merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang paling membutuhkan guna memutus rantai kemiskinan di perkotaan. Namun, secara teknis implementatif, masih terdapat ketidaksinkronan informasi dan kendala dalam proses verifikasi data di lapangan. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakannya sudah tepat secara filosofis, mekanisme teknisnya masih memerlukan evaluasi berkelanjutan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran atau hambatan administratif yang merugikan mahasiswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya (BPTS) dengan menggunakan enam kriteria William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa program ini secara filosofis telah menunjukkan ketepatan sasaran dan efektivitas dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah progresif Pemerintah Kota Surabaya melalui perluasan cakupan penerima bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) per Februari 2026 telah berhasil menciptakan pemerataan (*equity*) akses pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh warga asli Surabaya.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius pada dimensi kecukupan (*adequacy*) dan responsivitas. Terdapat fenomena *trade-off* kebijakan, di mana peningkatan kuota penerima (24.000 mahasiswa) berimplikasi pada pengurangan nominal bantuan individu. Kondisi ini menyebabkan nilai bantuan menjadi tidak memadai untuk menutupi beban biaya pendidikan dan kebutuhan hidup, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan serta keluhan dari penerima manfaat. Meskipun efisiensi administratif telah dicapai melalui digitalisasi sistem *Besmart*, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan realisasi lapangan terkait manajemen ekspektasi dan komunikasi publik atas perubahan regulasi. Secara keseluruhan, meskipun BPTS telah berjalan secara terstruktur, diperlukan penyesuaian mekanisme agar tujuan utama program untuk memutus rantai kemiskinan tidak terdistorsi oleh keterbatasan nominal bantuan.

SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya guna menyempurnakan implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di masa mendatang. Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan reevaluasi terhadap skema pendanaan bantuan agar nominal yang diterima mahasiswa dapat mencukupi kebutuhan riil pendidikan serta biaya hidup di wilayah metropolitan. Langkah ini krusial untuk merespons keluhan penerima manfaat terkait penurunan nilai bantuan akibat perubahan kebijakan dari pembiayaan penuh menjadi bantuan parsial. Kedua, aspek responsivitas harus ditingkatkan melalui manajemen komunikasi yang lebih baik mengenai perubahan regulasi kebijakan. Transparansi dalam sosialisasi diperlukan untuk mengelola ekspektasi mahasiswa dan meminimalisir persepsi negatif publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Ketiga, efektivitas implementasi teknis perlu diperkuat dengan mengoptimalkan sistem verifikasi data di lapangan untuk menuntaskan kendala administratif dan ketidaksinkronan informasi yang masih terjadi. Terakhir, pemerintah perlu menjamin keberlanjutan evaluasi program secara sistematis agar kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di lapangan dapat dideteksi lebih dini, sehingga tujuan utama program untuk memutus rantai kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Asfar, A. M. I. T., Asfar, A. M. I. A., Asfar, A. H., & Kurnia, A. (2020). *Landasan pendidikan: Hakikat dan tujuan pendidikan (Foundation of education: Essence and educational objectives)*. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22158.10566>
- Azizah, N. W. N., & Achdiani, Y. (2025). *Analisis kemiskinan di perkotaan terhadap akses pendidikan dan dampaknya terhadap pengangguran generasi muda*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial.
- Diana, A., Nizar., Sari, R. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 1(1), 157–166. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.168>

- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Habsy, B. A., Wulansari, D., Luthfiyati, A., & Najwa, N. S. (2024). *Konsep dasar ilmu pendidikan*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI), 2(2), 31–44. <https://doi.org/10.62017/jppi.v2i2.2932>
- Masykuri, I. A., Patimah, S., Warisno, A., Saputra, M. I., & Hidayah, N. (2025). *Faktor penyebab dan dampak tingginya angka putus sekolah*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 7986–7989. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25821>
- Mursal, R., Asriadi, A., Ahmad, A. D. P. A. S., Ham, H. F., Jumriana, J., Ainun, N., Nurkhaerah, N., Amalia, R., & Gaffar, A. (2024). *Reaktualisasi nilai pendidikan berbasis STEAM sebagai upaya menyongsong Indonesia Emas 2045*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(4).
- Pratama, D. P., Hadi, S., & Syaifuddin, M. (2023). *Implementasi kebijakan pendidikan*. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 5(1). <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i1.8365>
- Ramdhani, A., Ramdhani, M, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 5(1).
- Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). *Analisis implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan pada daerah tertinggal Indonesia*. Journal of Governance and Policy Innovation, 5(2), 99–112. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.